

**LAPORAN
PENELITIAN KELOMPOK MELIBATKAN MAHASISWA**



**PENANAMAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN MELALUI PROYEK
PEKAN HAK ASASI MANUSIA
(Studi atas Pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia 2012-2014)**

Oleh:

Halili, S.Pd., M.A.

Dr. Suharno, M.Si.

Zainal Abidin

Dwi Astuti Setiawan

Dibiayai oleh:

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
melalui DIPA Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta tahun 2015,
dan berdasarkan Kontrak Nomor /UN34.14/P/2015, tanggal 1 Mei 2015,
berdasarkan SK Dekan FIS UNY Nomor tahun 2015, tanggal 2015

**FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2015**

HALAMAN PENGESAHAN

1. Judul Penelitian : PENANAMAN NILAI-NILAI
KEMANUSIAAN MELALUI PROYEK
PEKAN HAK ASASI MANUSIA (Studi atas
Pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia 2012-
2014)
2. Bidang Penelitian : Sosial - Humaniora
3. Ketua Peneliti :
 - a. Nama Lengkap : Halili, S.Pd., M.A.
 - b. Jenis Kelamin : Laki-laki
 - c. NIP : 19780514 200604 1 004
 - d. Disiplin Ilmu : Pendidikan HAM, Politik Hukum
 - e. Pangkat/Golongan : Penata Muda tk. I, III/b
 - f. Jabatan : Asisten Ahli
 - g. Prodi/Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum
 - h. Alamat : Lantai 3 Gedung Pusat Fakultas Ilmu Sosial
UNY Karangmalang 55281 Yogyakarta
 - i. Telp/email : (0274) 586168 psw. 348
 - j. Alamat Rumah : Malangrejo Blok H/191 RT 3/RW 34
Wedomartani Ngeplak Sleman 55584
 - k. Telp/email : 081931752746, halili.yyu@gmail.com
4. Jumlah Anggota Peneliti : 3
5. Lokasi Penelitian : Indonesia
6. Jumlah biaya yang diusulkan : Rp 10.000.000,-

Yogyakarta, 30 Oktober 2015
Ketua Peneliti,

Halili, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19780514 200604 1 004

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Yogyakarta

Ketua Jurusan PKn dan Hukum
FIS UNY

Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
NIP. 19620321 198903 1 001

Dr. Samsuri, M.Ag.
NIP. 19720619 200212 1 001

**PENANAMAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN MELALUI PROYEK
PEKAN HAK ASASI MANUSIA (Studi atas Pelaksanaan Pekan Hak Asasi
Manusia 2012-2014)**

Abstrak

Oleh Halili, dkk.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Bagaimana detail pelaksanaan Proyek Pekan Hak Asasi Manusia berbasis pengalaman Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012-2014? 2) Bagaimana penanaman nilai-nilai kemanusiaan melalui pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia?

Penelitian ini merupakan penelitian campuran (mix-method) antara kualitatif dengan kuantitatif. Sumber data penelitian ini adalah jenis paper dan person. Teknik pengumpulan data: penyebaran angket, wawancara mendalam (*in-depth interview*), dan dokumentasi. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, pedoman wawancara, *chek list* dan *recording note*. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data induktif, meliputi reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi.

Hasil penelitian ini menyimpulkan; *Pertama*, detail pelaksanaan Pekan HAM dapat diurai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan meliputi penentuan tujuan, penentuan tema, menetapkan struktur organisasi pelaksana, merancang program, penentuan lokasi, alokasi dana, merencanakan strategi implementasi, dan merencanakan evaluasi. Implementasi Pekan HAM meliputi kegiatan: Pameran foto dan lukisan kemanusiaan, Pemutaran dan diskusi film kemanusiaan, Seminar Hak Asasi Manusia, Bakti Sosial dan Pendidikan HAM bagi Anak-anak Panti Asuhan, Donor darah, pada 2012 dan 2013, Konser musik kemanusiaan, Kampanye Pendidikan HAM di masyarakat, Lomba foto kemanusiaan, Lomba debat HAM, serta unjuk rasa damai dan pembagian 1000 bunga dalam rangka Peringatan Hari HAM Internasional. Evaluasi atas kegiatan tersebut telah dilakukan secara sumatif dan formatif. *Kedua*, Pekan HAM berhasil menanamkan nilai-nilai kemanusiaan berikut secara berurutan: kedamaian/perdamaian (*peace*), kecintaan (*love*), anti-kekerasan (*non-violence*), kebenaran (*truth*), dan perilaku baik (*right-conduct*). Meskipun demikian, proyek Pekan HAM juga memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam aspek pemilihan sub-sub kegiatan, manajemen waktu, dan biaya operasional.

Kata Kunci: *Pekan HAM, Penanaman Nilai, Pendidikan HAM*

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Sebab hanya atas karunia-NYA program pengabdian kepada masyarakat ini dapat diselesaikan sesuai rencana, baik pada aspek konten maupun waktunya.

Penelitian dengan judul “PENANAMAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN MELALUI PROYEK PEKAN HAK ASASI MANUSIA (Studi atas Pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia 2012-2014)” ini dilaksanakan dengan maksud melaksanakan salah satu agenda Tri Dharma Perguruan Tinggi, sebagai salah satu bentuk tanggungjawab sosial kampus terhadap masyarakat di luar kampus. Penelitian ini pastilah jauh dari kesempurnaan dan mengandung berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kami tim peneliti sangat terbuka dan bahkan mengharapkan berbagai tanggapan, kritik, pandangan, dan masukan dari sejawat peneliti lainnya atau para pihak terkait lainnya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada: 1) DP2M Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ditjen Dikti Kemristekdikti) yang telah mendanai program ini melalui DIPA FIS UNY, 2) Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, khususnya Sub-Bagian Akademik (Pendidikan dan Pengajaran), yang telah memberikan peran-peran fasilitasi dan memberikan *technical assistance* dalam pelaksanaan penelitian ini, 3) Seluruh kolega di Universitas Negeri Yogyakarta dan di lapangan, atas kerjasama dan kontribusinya dalam penelitian ini, 4) Para asisten peneliti dan tim teknis yang telah membantu kelancaran penelitian, 5) Para pihak yang tidak bisa kami sebutkan satu per satu. Kontribusi mereka atas penelitian ini sangat besar. Semoga Tuhan akan memberikan balasan yang berlipat atas budi baik mereka semua.

Terakhir, semoga penelitian ini bermanfaat, baik untuk pengembangan ilmu pengetahuan, bagi tim peneliti, maupun bagi masyarakat.

Yogyakarta, 30 Oktober 2015

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengesahan	ii
Abstrak	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar Isi	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
BAB II. KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA	4
A. Konsep dan Urgensi Hak Asasi Manusia	4
B. Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Penanaman Nilai-nilai Kemanusiaan	9
BAB III. METODE PENELITIAN	14
A. Jenis dan Pendekatan	14
B. Sumber Data/Subjek Penelitian	14
C. Teknik Pengumpulan Data	14
D. Instrumen Penelitian	15
E. Teknik Pengujian Keabsahan Data	15
F. Teknik Analisis Data	16
BAB IV. DESKRIPSI HASIL DAN PEMBAHASAN	17
A. Proyek Pekan Hak Asasi Manusia	17
B. Penanaman Nilai-Nilai Kemanusiaan	27

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	32
A. Kesimpulan	32
B. Saran	33
DAFTAR PUSTAKA	34

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara substantif, hak asasi manusia (HAM) merupakan bagian tak terpisahkan dari manusia. Oleh karena itu, orientasi paling tinggi HAM adalah bagaimana menjaga kehormatan dan martabat atau harga diri manusia (*human dignity*). Harga diri manusia, sebagai manusia maupun sebagai warga negara, dengan demikian, tergantung antara lain pada bagaimana pemenuhan hak-hak dasar bagi setiap manusia tersebut.

Persoalannya dinamika HAM belakangan ini menunjukkan gejala negatif yang disebut oleh Irene Khan (2005) sebagai krisis nilai HAM. Krisis nilai tersebut diindikasikan oleh beberapa gejala. Pertama, ambivalensi negara-negara dalam menempatkan nilai-nilai HAM sebagai nilai yang meggerakkan perilaku dan kebijakan negara-negara. Hal itu disebabkan pada pokoknya oleh fakta adanya inkonsistensi negara-negara dalam merespons aneka tragedi kemanusiaan yang terjadi di muka bumi. Masyarakat dunia di satu sisi dipertontonkan dengan berbagai tragedi kemanusiaan di Palestina, Myanmar, China, Korea Utara, negara-negara Afrika dan Timur tengah, dan sebagainya, namun di sisi lain kita juga menyaksikan kegagalan negara-negara, terutama negara-negara kuat di PBB, dalam memberikan respons tunggal dalam aneka tragedi kemanusiaan.

Situasi tersebut kemudian mendorong begitu banyak pakar untuk melabeli situasi tersebut sebagai standar ganda HAM. Dalam isu-isu kemanusiaan di negara-negara dunia ketiga, PBB dan negara-negara kuat di dalamnya kerap kali mengeluarkan resolusi bahkan yang memuat pemberian sanksi, akan tetapi kita saksikan betapa Israel kedap terhadap resolusi apalagi sanksi atas tragedi kemanusiaan yang terjadi di Palestina dalam beberapa dekade terakhir.

Kedua, kekeliruan dalam menempatkan Barat sebagai “sumber” dan kiblat HAM. Di dunia timur, termasuk Indonesia, HAM ditempatkan sebagai

agenda Barat dan berkiblat pada standar-standar Barat. Situasi ini melahirkan berbagai sinisme tentang HAM. Mulai dari lontaran sinis tentang ontologi HAM hingga imperativitasnya. HAM di sebuah konferensi di Malaysia dinyatakan bukan sebagai *human rights* akan tetapi *human wrongs* (Chandra Muzaffar, 2007). Di level negara bahkan muncul penolakan untuk menjadikan HAM sebagai nilai pokok yang menggerakkan perilaku dan kebijakan negara untuk memenuhi hak-hak warga negaranya. Tiga pemimpin negara pada era kejayaannya, yaitu Lee Kwan-Yew, Mahathir Muhammad, dan Soeharto kerap kali mengekspresikan statemen dan gestur penolakan pada nilai-nilai HAM yang mereka identifikasi sebagai nilai-nilai Barat, dan sebagai gantinya mereka memperkenalkan apa yang disebut sebagai *Asian values* yang pada prakteknya dalam pemerintahan sesungguhnya kerap dijadikan alibi atas terjadinya kasus-kasus kemanusiaan.

Ketiga, dan ini yang paling akut, adalah rendahnya pemahaman dan juga kepedulian warga tentang HAM. Dalam konteks Indonesia, kepedulian warga merupakan tantangan serius pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Dalam Indeks Persepsi HAM yang dirilis oleh Setara Institute for Peace and Democracy (2013), dinyatakan bahwa HAM berhadapan dengan beberapa tantangan serius, yaitu; 1) lemahnya komitmen Presiden, 2) masyarakat yang tidak peduli, 3) dasar hukum yang tidak memadai, dan 4) lemahnya dukungan DPR.

Tiga problema aktual tersebut menegaskan pentingnya pemajuan HAM melalui penguatan nilai-nilai kemanusiaan. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan aspek kemanusiaan yang bersifat universal. Penanaman nilai-nilai kemanusiaan yang baik dan efektif akan mengatasi masalah fundamental krisis nilai HAM. Promosi HAM dapat dilakukan melalui kegiatan, proses, dan lembaga-lembaga pendidikan, di antaranya melalui subjek formal kurikuler.

Untuk kepentingan tersebut, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta menyelenggarakan proyek pendidikan Pekan Hak Asasi Manusia (Pekan

HAM). Pekan HAM yang sudah diselenggarakan secara rutin sejak tahun 2010 merupakan salah satu bentuk promosi HAM melalui aneka kegiatan.

Sebagai sumbangan pendidikan untuk pemajuan HAM, diperlukan elaborasi lebih mendalam dan diseminasi untuk khalayak yang lebih luas, sebagaimana juga diperlukan studi deskriptif dan evaluatif atas itu. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengelaborasi pelaksanaan Pekan HAM baik pra program maupun pasca program, selama tiga tahun terakhir, 2012-2014.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat diajukan rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana detail pelaksanaan Proyek Pekan Hak Asasi Manusia berbasis pengalaman Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012-2014?
2. Bagaimana penanaman nilai-nilai kemanusiaan melalui pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengelaborasi detail pelaksanaan Proyek Pekan Hak Asasi Manusia berbasis pengalaman Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, tahun 2012-2014
2. Menganalisis penanaman nilai-nilai kemanusiaan melalui pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA

A. Konsep dan Urgensi Hak Asasi Manusia

HAM, dalam pengertian yang sederhana, merupakan hak yang secara alamiah dan kodrati melekat pada makhluk hidup yang bernama manusia semata-mata karena ia merupakan manusia (*human being*), bukan makhluk lain selain manusia. Begitu maujud seorang manusia, maka melekat dalam dirinya hak tersebut. Hak-hak asasi tersebut sangat berkaitan erat dengan harkat dan martabat manusia (*human dignity*). Tanpa hak-hak dasar tersebut manusia tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya itu. Pemenuhan dan penghormatan terhadap HAM memungkinkan perseorangan dan masyarakat untuk berkembang secara utuh.

Beberapa pakar dan praktisi gerakan HAM berada dalam simpang pemikiran yang berbeda dalam memahami (dan juga memperjuangkan) HAM.. Jack Donnelly menekankan bahwa umat manusia memiliki hak-hak dasar bukan atas dasar pemberian hukum positif, namun dimilikinya secara kodrati, karena martabatnya sebagai manusia (Donnelly, 2003: 70). Pandangan Donnelly menegaskan bahwa HAM muncul bersamaan dengan lahirnya kedirian manusia.

Terdapat beberapa pengertian yang pendekatannya yuridis. Louis Henkin sebagaimana dikutip Rafael Edy Bosko (2004: 3), misalnya, mengartikan HAM sebagai: kebebasan-kebebasan (*liberties*), kekebalan-kekebalan (*immunities*) dan kepentingan-kepentingan atau keuntungan-keuntungan (*benefits*), yang berdasarkan norma-norma hukum yang ada seyogyanya dapat diklaim (*should be able to claim*) sebagai hak oleh individu atau kelompok kepada masyarakat dimana dia tinggal. Definisi tersebut menunjukkan kecenderungan HAM sebagai apa yang sudah diatur sedemikian rupa dalam norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, namun sekaligus sesuatu yang dapat diperjuangkan atau dituntut

oleh perorangan atau kelompok sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat setempat.

Tidak jauh berbeda dengan Henkin, Osita Eze menyatakan bahwa HAM merupakan tuntutan atau klaim yang dilakukan oleh individu atau kelompok kepada masyarakat atau negara, yang sebagiannya telah dilindungi dan dijamin oleh hukum, dan sebagiannya lagi masih menjadi aspirasi atau harapan di masa depan (Bosko, 2004: 3). Eze memberikan tekanan pada realitas bahwa hak-hak dasar tersebut belum sepenuhnya dilindungi oleh hukum negara. Dalam perspektif demikian, pemenuhan HAM yang ideal secara filosofis membutuhkan perjuangan individu atau kelompok untuk mendapatkan pemenuhan dan perlindungan legal dari negara.

Frans Magnis-Suseno menekankan dua unsur utama dalam pengertian HAM. *Pertama*, bahwa hak-hak itu mendahului penetapan negara. Dalam hal ini tidak jauh berbeda dengan apa yang dipaparkan Donnelly di muka. *Kedua*, bahwa hak-hak itu bersifat universal. Universalitas HAM merujuk pada maksud bahwa HAM berlaku untuk seluruh ras manusia, tanpa melihat apa warna kulitnya, dalam latar etnis atau suku apa ia lahir, apa agamanya, bagaimana asal-usul keturunannya, dan sebagainya.

Dengan spektrum konseptual tersebut, tampak jelaslah bahwa substansi HAM secara generik diakui sebagai sesuatu yang melekat (*inherent*) pada manusia, tidak dapat dicabut dan dipisahkan (*inalienable and indivisible*), bersifat kodrati (*natural*), dan berkaitan dengan penegakan atau penghormatan martabat kemanusiaan (*human dignity*). Namun secara legal, HAM merupakan sejumlah hak dasar berupa tuntutan-tuntutan (*claims*) yang dapat dituntutkan pemenuhannya kepada hukum dan pemerintahan negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, sebagai norma universal bagi negara-negara beradab, menyebut pada konsideransnya bahwa “...recognition of **the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all members of the human family** is the foundation of freedom, justice and peace in the world”, dan kemudian segera ditegaskan bahwa “...it is essential, if a man is not to be compelled to have recourse, as a last resort, to rebellion

against tyranny and oppression, that **human rights should be protected by the rule of law**” (Paragraf Ketiga *Preamble*, Universal Declaration of Human Rights 1948). Secara subsantio-filosofis, HAM merupakan hak dasar yang melekat pada manusia secara kodrati, namun secara legal hal itu harus mendapatkan jaminan perlindungan dari sistem hukum negara. Dalam konteks Indonesia, hal ini sebangun dengan afirmasi dalam sistem hukum Indonesia yang menyatakan filosofi HAM sebagai hak dasar yang secara kodrati **melekat pada diri manusia**, bersifat **universal dan langgeng**, oleh karena itu harus **dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun**, yang kemudian ditegaskan keharusan penghormatan dan perlindungannya oleh sistem hukum negara melalui statemen bahwa “...HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh **negara hukum, Pemerintahan, dan setiap orang** demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia” (Pasal 1, UU No 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

HAM teramat penting untuk menjadi *concern* kita semua, tak hanya di dunia aktivisme akan tetapi juga di lingkungan akademis. Hal itu dikarenakan oleh berbagai latar, antara lain sebagai berikut:

Pertama, HAM adalah hak elementer dan fundamental tentang manusia, harkat dan martabatnya. Kajian HAM terkait dengan keadaan-keadaan (*circumstances*) yang sangat generik, bahkan sebelum manusia terpilah-pilah atas dasar label identitas: sebelum manusia terbagi ke dalam berbagai kewarganegaraan, terkontak-kotak ke dalam berbagai anggota komunitas dunia, dan seterusnya. Label identitas merupakan situasi yang hadir kemudian.

HAM tidak berbicara mengenai hak-hak seseorang ketika dia menjadi anggota atau bagian dari komunitas tertentu. Memang, melekatnya hak pada individu di satu sisi, jelas melahirkan kewajiban dan tanggung jawab pada komunitas di sisi yang lain. Ketika berbicara mengenai hak dasar yang

melekat pada suatu kelompok, sekaligus berbicara mengenai kewajiban dan tanggung jawab pada kelompok yang lebih besar (supra komunitas). Namun, relasi demikian lebih banyak terkait dengan mekanisme formal pemenuhan, penegakan, dan penghormatan hak-hak dasar tersebut.

Kedua, HAM merupakan alat peradaban/sarana sipilisasi (*a civilizing tool*). Potret kebiadaban negara sudah berlangsung jauh sebelum Perang Dunia II. Realitas tersebut mengakibatkan kemunduran besar kemanusiaan: secara fisik, jiwa, sosio-ekonomi, sosio-kultural. Isu HAM menjadi gerakan global untuk menciptakan tatanan dunia yang lebih beradab (*civilized*). Ketika isu demokrasi dan demokratisasi dijadikan pintu gerbang untuk menetralkan dan mereduksi kebiadaban negara atas warga negaranya, kegagalan segera membayang karena negara lalu bersembunyi di balik tameng kedaulatan negara (*state sovereignty*).

Banyak contoh keberhasilan penggunaan isu HAM dalam memberikan pelajaran kepada negara-negara yang abai menjamin penegakan, pemenuhan, dan penghormatan kepada warganya. Contoh paling dekat adalah Indonesia. Ketika berbagai kebiadaban pemerintahan Orde Baru berlangsung atas warganya, banyak kalangan termasuk Asing yang berpikir untuk memperbaiki keadaan di Indonesia dengan menggunakan isu demokrasi. Namun, pemerintah Orde Baru dapat berkelit dengan mengatakan bahwa “kami negara yang demokratis”. Buktinya, proses elektoral selalu berlangsung secara reguler, partai politik hidup, kebebasan berorganisasi dijamin, pemuda berorganisasi, wartawan memiliki wadah organisasi, kelompok agamawan juga berhimpun dalam organisasi, buruh tergabung dalam assosiasi, dan seterusnya. Namun, Pemerintah tidak bisa mengelak dari tudingan pihak luar soal isu HAM. Secara faktual telah terjadi pembantaian atas satu jutaan lebih warga negara setelah “Revolusi Komunis” yang gagal pada tahun 1965. Pemerintah Orde Baru sulit berkelit atas terjadinya pembantaian sipil oleh tentara dalam Tragedi Tanjung Priok. Pemerintah tidak bisa menyangkal ketika Kasus Marsinah, Udin, dan sejenisnya lalu diangkat bukan sebagai isu demokrasi, akan tetapi sebagai isu HAM.

Contoh yang lain adalah Myanmar. Ketika isu demokratisasi digulirkan oleh masyarakat internasional dengan ikon lokal Aung San Suu Kyi, junta militer bergeming. Saat komunitas internasional mendesak Myanmar untuk masuk ke dalam gelombang demokrasi dan membebaskan aktivis pro demokrasi Suu-Kyi, Pemerintah Militer Myanmar tidak mengindahkan respon tersebut sambil terus berargumentasi bahwa persoalan dalam negeri Myanmar adalah yurisdiksi mereka dan Myanmar memiliki kedaulatan atas yurisdiksi mereka sendiri. Sehingga setiap permintaan dunia internasional untuk masuk ke Myanmar, bahkan sekedar untuk menunjukkan solidaritas kepada Suu-Kyi selalu ditolak oleh Pemerintah Myanmar. Sampai kemudian internasional menggeser isu demokrasi kepada isu HAM. Kira-kira persuasi masyarakat internasional berbunyi: “Tak masalah Myanmar akan memilih sistem pemerintahan apapun, tapi tak ada legitimasi bagi pemerintah negara manapun untuk melakukan pelanggaran terhadap hak-hak dasar warganya”. Dengan berbekal “bendera” HAM, sebuah tim internasional akhirnya diperkenankan masuk ke Myanmar untuk menyatakan simpatinya kepada aktivis pro demokrasi tersebut. Bahkan dalam kerangka isu kemanusiaan, masyarakat internasional menegaskan pentingnya Badan PBB untuk Investigasi Kejahatan Kemanusiaan di Myanmar (Kompas, 18 Agustus 2010: 3).

Ketiga, HAM merupakan nilai dasar peradaban global. Pasca Perang Dunia II muncul semacam kesadaran kolektif masyarakat dunia bahwa tatanan dunia harus diubah agar lebih damai dan mendamaikan. Pengalaman korban perang yang mengerikan karena penggunaan berbagai produk teknologi persenjataan yang nir pertimbangan kemanusiaan mendorong komunitas internasional untuk melakukan pertobatan massal dan mengikatkan diri dalam komitmen global yang damai dengan nilai-nilai baru berbasis kemanusiaan. Komitmen masyarakat dunia tersebut diejawantahkan dalam bentuk Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Deklarasi tersebut didasarkan pada keyakinan penuh bahwa hak asasi manusia adalah nilai dasar

yang menempatkan kemanusiaan melampaui berbagai pertimbangan apapun: politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural, kedaulatan negara, dan sebagainya.

B. Pendidikan Hak Asasi Manusia dan Penanaman Nilai-nilai Kemanusiaan

Pendidikan HAM merupakan salah satu isu penting dalam diskursus dan gerakan kemanusiaan universal. Dunia telah memberikan penegasan tentang pentingnya Pendidikan HAM melalui PBB. The World Conference on Human Rights (Vienna, June 1993) melalui the Vienna Declaration and Programme of Action menyatakan bahwa pendidikan, pelatihan, dan informasi publik HAM sangat penting untuk memajukan dan mewujudkan hubungan yang harmonis dan stabil di tengah-tengah masyarakat dan untuk memajukan kedamaian, toleransi, dan saling memahami.

Apa urgensi Pendidikan HAM tersebut? Pertama, ada konsensus universal bahwa pendidikan hak asasi manusia adalah penting dan dapat berperan mengurangi pelanggaran HAM, dan mewujudkan pembangunan masyarakat yang bebas, adil, dan damai. Selain itu, pendidikan HAM juga semakin diakui sebagai strategi yang efektif untuk mencegah pelanggaran hak asasi manusia (Report of the Secretary-General on Guidelines for national plans of action for human rights education, 1997).

Untuk memenuhi urgensi tersebut di atas, mengacu pada dokumen di atas, HAM dipromosikan melalui tiga dimensi kampanye pendidikan:

1. Pengetahuan. Dimensi pengetahuan dalam kampanye HAM memberikan informasi tentang hak-hak dan mekanisme manusia untuk melindungi mereka.
2. Nilai, keyakinan dan sikap. Dimensi ini merupakan promosi budaya hak asasi manusia melalui pengembangan nilai-nilai, keyakinan dan sikap yang menjunjung tinggi hak asasi manusia.
3. Aksi. Dimensi aksi dalam pendidikan ini mendorong orang untuk mengambil tindakan guna membela HAM dan mencegah pelanggaran HAM.

Setelah memahami urgensi tersebut, tampaknya perlu untuk diulas apa sesungguhnya pendidikan hak asasi manusia tersebut. Mengacu pada berbagai instrumen internasional hak asasi manusia, PBB melalui dokumen Dekade Pendidikan Hak Asasi Manusia mendefinisikan bahwa yang dimaksud Pendidikan HAM adalah pelatihan, penyebaran informasi dan upaya-upaya yang ditujukan untuk membangun budaya universal hak asasi manusia melalui menanamkan pengetahuan dan keterampilan dan mencetak sikap, yang diarahkan untuk:

1. Penguatan respek hak asasi manusia dan kebebasan fundamental
2. Pembangunan secara utuh kepribadian manusia dan kesadaran akan harga dirinya
3. Peningkatan pemahaman, toleransi, kesetaraan gender dan persahabatan di antara semua bangsa, masyarakat adat dan ras, kelompok nasional, etnis, agama dan bahasa
4. Memungkinkan semua orang untuk berpartisipasi secara efektif dalam suatu masyarakat yang bebas;

Dalam perspektif demikian, salah satu dimensi yang ingin ditekankan dalam Pendidikan HAM adalah mengenai penanaman nilai-nilai, dalam hal ini nilai-nilai yang menopang pemenuhan, perlindungan, dan promosi HAM. Nilai-nilai tersebut akan menjadi salah satu yang menggerakkan tindakan dan perilaku manusia dalam tatanan masyarakat demokratis dan damai.

Apakah nilai itu? Nilai merupakan kualitas yang melekat pada atau di dalam suatu objek. Kalau kita bicara mengenai kualitas, berarti kita bicara mengenai keberhargaan (*worth*). (Rukiyati, 2008). Sebuah barang yang berkualitas biasanya berharga. Suatu komoditas atau barang dagangan yang berkualitas biasanya berharga atau dihargai dengan harga yang mahal. Seorang penjual tidak keberatan mengeluarkan sejumlah uang dengan nominal tinggi sebagai harga yang harus dibayar untuk mendapatkan barang atau jasa yang berkualitas.

Nilai juga berkenaan dengan kebaikan (*goodness*) (Rukiyati, 2008). Sesuatu yang baik disebut bernilai atau memiliki nilai. Sesuatu yang buruk tidak disebut bernilai. Jika kita berperilaku baik ditengah-tengah kehidupan sosial atau bermasyarakat, maka kita akan menjadi anggota masyarakat yang bernilai. Kehadiran kita pasti ditunggu-tunggu dan diharapkan. Sebaliknya jika kita berperilaku buruk atau tidak baik maka kita akan menjadi orang yang tidak bernilai di tengah-tengah masyarakat. Keberadaan kita pun tidak diharapkan oleh masyarakat.

Nilai merupakan sesuatu yang abstrak. Karena abstrak, nilai merupakan konsep yang tidak mudah untuk dijelaskan. Namun secara sederhana dapat dikatakan bahwa nilai merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang dicari, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan (Bertens, 1993). Intinya, nilai adalah sesuatu yang baik atau sesuatu yang positif, yang diinginkan dan dicari, sehingga memandu langkah kita untuk mewujudkannya.

Dalam perspektif psikologis, Gordon Allport memandang bahwa nilai merupakan keyakinan yang membuat seseorang bertindak atas dasar pilihannya (Mulyana, 2004). Sementara itu keyakinan menempati wilayah psikologi yang lebih tinggi dari area psikologis lainnya seperti hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan. Dengan demikian, nilai berada di atas hasrat, motif, sikap, keinginan, dan kebutuhan.

Secara lebih konkrit kaitannya dengan tindakan, Kuperman mengatakan bahwa nilai adalah patokan normatif yang mempengaruhi manusia dalam menentukan pilihannya di antara berbagai alternatif tindakan (Mulyana, 2004). Nilai dengan demikian memandu tindakan yang diambil oleh seseorang agar senantiasa mengacu dan sesuai dengan norma-norma yang ada.

Pembahasan mengenai nilai selalu kompleks. Namun, dengan berpijak pada berbagai konsep yang ada dapat disintesis bahwa nilai adalah kebaikan dan keberhargaan yang menjadi patokan normatif dan memandu

keyakinan seseorang untuk mengambil sikap dan tindakan tertentu dari berbagai alternatif sikap dan tindakan yang tersedia.

Nilai dapat dikategorikan ke dalam beberapa lapis yang saling mengisi satu sama lain. Meminjam Logoterapi Viktor Frankl, nilai dapat dikategorikan ke dalam tiga tipe: *creative values*, *experiential values*, dan *attitudinal values* (Millon, 2004). Secara sederhana, *creative values* ialah nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di dalam proses internal berkarya atau berkreasi, contoh: melalui melukis akan tumbuh dan berkembang nilai menghargai keindahan dan harmoni. *Experiential values* merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari mengalami langsung melalui proses interaksional di dalam lingkungan, misal nilai kejujuran akan tumbuh dan berkembang dari mengalami sendiri indahnya lingkungan yang jujur dan melalui interaksi yang jujur pula. Sedangkan *attitudinal values* merupakan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dari sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh diri, seperti nilai respek dan menghargai diri sendiri akan tumbuh dan berkembang dari perilaku membantu dan menolong orang lain.

Kemudian apa yang dimaksud dengan nilai kemanusiaan dalam studi ini? Nilai-nilai kemanusiaan adalah konsep universal yang dapat ditemukan di banyak masyarakat, aneka kebudayaan, dan di berbagai tempat dimana manusia hidup. Nilai-nilai kemanusiaan merupakan kebajikan dan keberhargaan yang mendorong manusia untuk bersikap dan bertindak sesuai dengan derajat tertinggi harkat dan martabat dirinya sebagai manusia.

Mengacu pada pandangan Parnell (2014), ada lima nilai kemanusiaan yang dapat kita temukan dalam semua kebudayaan, seluruh masyarakat dan dalam setiap agama, yaitu kebenaran (*truth*), perilaku benar (*right-conduct*), cinta (*love*), perdamaian (*love*), dan anti-kekerasan (*non-violence*). Nilai-nilai ini abadi dalam setiap konteks tempat dan waktu yang dimiliki seluruh manusia. Nilai-nilai tersebut merupakan esensi abadi, yang mengangkat kehidupan manusia untuk ekspresi tertinggi dan kapasitas tertinggi. Mereka membawa manusia ke puncak tertinggi kebahagiaan. (<http://www.saieditor.com/falco/values.html>).

Nilai-nilai kemanusiaan tersebut harus dibangun dan ditanamkan melalui metode yang paling tepat. Bekaitan dengan perspektif Frankl di atas, maka dalam konteks pendidikan, penanaman nilai-nilai kemanusiaan tersebut semestinya dilakukan melalui proses-proses kreatif, dalam pengalaman-pengalaman riil, dan perilaku langsung subjek didik.

Dalam rangka penanaman nilai-nilai kemanusiaan tersebut, Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum melalui mata kuliah Pendidikan Hak Asasi Manusia menyelenggarakan proyek pembelajaran berupa pekan Hak Asasi Manusia. Dengan salah satu bentuk kegiatan promosi hak asasi manusia tersebut, diharapkan akan tumbuh semakin kuat nilai nilai; kebenaran, perilaku-baik, cinta, kedamaian, dan anti-kekerasan. Dengan menyebarnya pengembangan nilai-nilai tersebut, akan terjadi proses eskalasi kemanusiaan yang akan sangat memberikan maslahat, tidak saja bagi manusia itu sendiri, akan tetapi juga bagi masyarakat secara lebih luas.

BAB III

METODE PENELITIAN

a. Jenis dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian campuran (*mix-method*) antara kualitatif dengan kuantitatif. Penelitian kualitatif yang dimaksud adalah penelitian yang dilakukan secara intensif dan terperinci terhadap suatu organisme, lembaga, atau gejala tertentu melalui suatu pengamatan atau analisis untuk menghasilkan data deskriptif, yaitu data yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang, gejala atau perilaku yang diamati (Molleong, 1991: 3). Sedangkan kuantitatif merujuk pada pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

b. Sumber Data/Subjek Penelitian

Yang dimaksud dengan sumber data disini adalah subjek dari mana data diperoleh. Suharsimi Arikunto (2002: 107) mengklasifikasi sumber data menjadi tiga jenis ; a. *person*, yaitu sumber data berupa orang. b. *place*, yaitu sumber data berupa tempat, dan c. *paper*, yaitu sumber data berupa simbol. Berdasarkan klasifikasi tersebut, maka sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis *paper* dan *person*. Sumber data tersebut berupa buku-buku, dokumen-dokumen seperti peraturan perundang-undangan, dan internet.

c. Teknik Pengumpulan Data

1. Penyebaran Angket

Penyebaran angket dilakukan untuk mendapatkan data mengenai dampak Pekan Hak Asasi Manusia dalam penanaman nilai-nilai kemanusiaan.

2. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan kepada informan-informan kunci Pekan Hak Asasi Manusia, seperti Ketua Penyelenggara, Panitia Inti, dan audiens. Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk mendapatkan data mengenai detail penyelenggaraan Pekan Hak Asasi Manusia

3. Dokumentasi

Yang dimaksud adalah pengkajian atas berbagai dokumen resmi baik yang bersifat internal maupun eksternal. Bersifat internal dalam artian pengkajian langsung atas dokumen, sedangkan yang bersifat eksternal berupa sumber-sumber yang mendukung pengkajian atas dokumen. Dokumen internal yang dimaksud adalah Laporan Pertanggungjawaban dan arsip foto dan dokumentasi lainnya.

d. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah angket, pedoman wawancara, *check list* dan *recording note*. Angket dan pedoman wawancara merupakan instrumen pokok untuk mendapatkan data primer. Sedangkan *check list* dan *recording note* tersebut digunakan untuk melacak dan merekam data sekunder yang dihasilkan melalui dokumentasi.

e. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi, yaitu suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu (Moleong, 2002: 178). Teknik triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang diperoleh dari satu *paper* dengan *paper* yang lain; buku dengan dokumen, buku satu dengan buku yang lain, atau dokumen yang satu dengan dokumen yang lain.

f. Teknik Analisis Data

Analisis data menurut Patton (Moleong, 1989 : 205) adalah proses mengatur urutan data, mengorganisir data ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian data. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data induktif. Langkah-langkah analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, yang menurut Sayekti Pujosuwarno (1992 : 19), meliputi reduksi data, display data, kesimpulan dan verifikasi, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, dan penyaringan data yang diperoleh dari studi literatur dan dokumen yang relevan dengan masalah yang diteliti.

2. Display data

Display data yang dilakukan berupa penyajian secara deskriptif atau naratif data yang telah direduksi dalam bentuk laporan yang sistematis.

3. Pengambilan kesimpulan dan verifikasi

Pengambilan kesimpulan dan verifikasi adalah penarikan kesimpulan dengan berangkat dari rumusan masalah atau tujuan penelitian kemudian senantiasa diperiksa kebenarannya untuk menjamin keabsahannya.

BAB IV

DESKRIPSI HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Proyek Pekan Hak Asasi Manusia

1. Perencanaan, Implementasi, dan Evaluasi

Pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia dibagi ke dalam beberapa tahapan agar pelaksanaan pelaksanaan proyek sesuai dengan tujuan dan dapat memberi manfaat, tahap pelaksanaan yaitu: perencanaan, implementasi, dan evaluasi.

Pertama, perencanaan. Tahap Perencanaan sebagai tahap awal pelaksanaan proyek meliputi: penentuan tujuan, penentuan tema, menetapkan struktur organisasi pelaksana, merancang program, penentuan lokasi, alokasi dana, merencanakan strategi implementasi, dan merencanakan evaluasi.

Pada tataran tujuan, pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia dari tahun 2011 sampai 2013 memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memajukan (mempromosikan) hak asasi manusia sebagai bagian dari penopang terbangunnya masyarakat yang setara, damai, dan demokratis. Unsur yang membedakan pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia dari tahun ke tahun terletak pada tema kegiatan dan pesan yang ingin disampaikan. Pemilihan tema kegiatan merupakan hasil formulasi dari isu Hak Asasi Manusia yang berkembang di setiap tahun pelaksanaan.

Sebagai contoh pada tahun 2011, situasi hak asasi manusia di Indonesia sedang merosot, khususnya dalam segi kebebasan beragama ditandai dengan mencuatnya aksi-aksi kebringasan massal yang seringkali dikaitkan dengan sentimen keagamaan, terutama dengan dirusaknya tempat-tempat ibadah. Sejumlah kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama dilaporkan pada tahun 2011, antara lain pembunuhan tiga jemaah Ahmadiyah pada bulan Februari 2011, kondisi tersebut menjadi titik fokus penyelenggaraan Pekan HAM di tahun ini. Melalui kampanye “Hak Manusia untuk Persatuan” dengan mengedepankan nilai-nilai

kemanusiaan secara universal diharapkan mampu mendobrak batas ikatan-ikatan sektarian atau “primordial”. Oleh karena itu, Pekan HAM 2012 mengusung tema “Hak Manusia untuk Persatuan” dengan tujuan untuk mengkampanyekan hak asasi manusia sebagai faktor pemersatu.

Tujuan, tema, dan pesan yang ingin disampaikan kemudian dieksekusi dalam rancang program-program yang akan dilaksanakan. Bentuk-bentuk program disepakati lewat diskusi dalam organisasi pelaksana. Selain itu, juga disepakati strategi dan mekanisme pelaksanaan program disertai dengan penanggungjawab masing-masing program. Penentuan lokasi kegiatan juga menjadi fokus utama yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan, tema, dan pesan yang ingin disampaikan pada tahun pelaksanaan. Sebagai contoh, pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia tahun 2013 mengusung tema “*Right Human for Human Rights*”, pesan yang ingin disampaikan pada pelaksanaan kali kedua ini adalah mengenang kembali jasa-jasa pejuang HAM, sehingga semangat para pejuang HAM akan tewarisi oleh generasi muda di masa sekarang. Oleh karena itu, kampus sebagai basis massa usia muda menjadi lokasi pelaksanaan program. Hal lain yang sangat penting dalam tahap perencanaan adalah pembiayaan dan alokasi dana setiap program. Pembiayaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia sepenuhnya dari iuran mahasiswa dan sponsor, dana yang ada kemudian dialokasikan pada masing-masing program sesuai dengan proporsinya.

Kedua, implementasi. Implementasi program merupakan eksekusi dari tahapan perencanaan yang terdiri atas 2 langkah utama, yaitu sosialisasi dan pelaksanaan program itu sendiri. Sosialisasi yang dimaksud berupa pemberian informasi kepada masyarakat dan *stakeholder* tentang proyek Pekan Hak Asasi Manusia. Tujuan dari sosialisasi ini adalah agar masyarakat dan *stakeholder* memahami program Pekan Hak Asasi Manusia mengenai apa latar belakang dan tujuan program, hasil apa yang ingin dicapai, manfaat apa yang didapat oleh masyarakat dan *stakeholder*, dan kegiatan apa saja yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Hasil yang diharapkan dari pelaksanaan sosialisasi adalah masyarakat dan *stakeholder* dapat memahami secara utuh program Pekan Hak Asasi Manusia, dengan meningkatnya pemahaman secara utuh terhadap program program Pekan Hak Asasi Manusia, diharapkan masyarakat dan *stakeholder* akan termotivasi untuk mendukung program tersebut. Untuk itu, maka proses sosialisasi tidak hanya dilakukan pada awal pelaksanaan program saja tetapi berlangsung secara terus menerus sampai pada akhir pelaksanaan program. Sosialisasi program Pekan Hak Asasi Manusia melalui berbagai media informasi dan publikasi, baik cetak maupun elektronik Media cetak yang dapat dimanfaatkan antara lain adalah leaflet/brosur, koran, serta media elektronika seperti internet. Selain itu, sosialisasi program juga dilakukan secara personal dengan memanfaatkan jaringan dengan *stakeholder* dan masyarakat.

Pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia dari tahun 2012-2014 diisi dengan berbagai program kegiatan yang berbeda setiap tahunnya, meskipun pada beberapa program kegiatan, rutin diselenggarakan tiap tahunnya. Pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia dari tahun 2011-2013 sebagai berikut:

a. Pekan Hak Asasi Manusia Tahun 2012

Pekan HAM 2011 digelar pada 5-10 Desember 2012 dengan tujuan untuk mengkampanyekan hak asasi manusia sebagai faktor pemersatu. Kampanye “Hak Manusia untuk Persatuan” ditransformasikan ke dalam berbagai kegiatan Pekan HAM tahun 2011, tercatat ada 6 kegiatan besar.

Kegiatan pada tahun ini dibuka dengan pameran yang menampilkan puluhan foto dan lukisan. Dengan mengusung tema “Hak Asasi Manusia”, seniman, mahasiswa, dan LSM yang *concern* terhadap isu-isu HAM asal Yogyakarta mencoba menampilkan potret perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM di Yogyakarta. Pameran ini mendapat apresiasi tinggi dari civitas akademika kampus, selain karena lokasi strategis di tengah-tengah lingkungan kampus, animo pengunjung pameran muncul dari keberhasilan seniman dalam mengemas karya

bernuansa “*human interest*” sehingga kita seolah berada di ruang dan waktu yang sama dengan obyek foto dan lukisan.

Kegiatan hari kedua tanggal 6 Desember 2012 diisi dengan pemutaran dan diskusi film “*The Pianist*”. Lewat film garapan sutradara Roman Polanski ini, peserta diskusi diajak menyelami sisi-sisi konflik masa invasi Nazi (Jerman) ke Polandia, masa yang menggambarkan konflik atas dasar perbedaan ras dan agama yang menimbulkan teror, kekejaman, kelaparan dan kematian terjadi di mana-mana. Pada tanggal 7 Desember 2012, Pekan HAM 2012 diisi dengan kegiatan seminar bertemakan “Hak Asasi Manusia untuk Persatuan Bangsa”. Seminar tersebut menghadirkan akademisi dan pegiat hak asasi manusia serta mahasiswa untuk duduk bersama membahas potensi konflik dari negara bangsa Indonesia, serta berbagai solusi yang ditawarkan termasuk dengan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan secara universal.

Sebagai wujud kepedulian terhadap sesama manusia dan tanggung jawab sosial untuk dapat memberikan manfaat terhadap masyarakat, kegiatan Pekan HAM 2012, 8 Desember 2012 dilaksanakan di lingkungan Panti Asuhan. Bentuk kegiatan berupa bhakti sosial/pemberian bantuan serta Pendidikan HAM bagi anak-anak penghuni panti asuhan. Hari Jumat 9 Desember 2012 digelar konser amal bertajuk “*Music for Humanity*” guna menumbuhkan kesadaran generasi muda akan pentingnya perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM. Pekan HAM 2012 ditutup dengan aksi damai (demonstrasi), bertepatan *Human Rights Day* yang secara internasional diperingati tanggal 10 Desember. Kegiatan hari terakhir ini selain untuk melakukan kampanye pentingnya “Hak Manusia untuk Persatuan” kepada masyarakat Yogyakarta juga untuk menyampaikan tuntutan kepada pemerintah untuk menindak tegas pelanggar HAM dan melindungi hak-hak kaum minoritas.

b. Pekan Hak Asasi Manusia Tahun 2013

Pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia tahun 2013 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, perbedaan mendasar

teletak pada tema kegiatan. Pekan HAM tahun ini mengusung tema “*Right Human for Human Rights*”. Pesan yang ingin disampaikan pada pelaksanaan kali ketiga ini adalah mengenang kembali jasa-jasa pejuang HAM, sehingga semangat para pejuang HAM akan tawarisi oleh generasi muda di masa sekarang. Bulan Desember dianggap sebagai momentum yang tepat untuk menggugah kesadaran generasi muda mengenai HAM, sebagai instrumen pengingat bahwa peradaban manusia pernah mengalami pelanggaran-pelanggaran krusial dan massif atas kemanusiaan.

Pekan HAM 2012 digelar pada tanggal 3-10 Desember 2013, tercatat ada 6 acara besar dalam pelaksanaan kali ini. Serupa dengan tahun sebelumnya, kegiatan pembuka Pekan HAM 2012 tanggal 03 Desember 2012 diisi dengan pameran foto dan lukisan bertemakan “*Art for Human Rights*”. Pameran bersama yang diikuti oleh mahasiswa dan seniman asal Yogyakarta tersebut menjadi ajang untuk mengekspresikan ide dan gagasan dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM di Indonesia.

Tanggal 04 Desember 2013, dilaksanakan kegiatan donor darah dengan mengusung tema “Setetes Darah untuk Kemanusiaan”. Peserta donor darah berasal dari kalangan mahasiswa. Hal ini merupakan upaya untuk meningkatkan kepedulian sosial generasi muda terhadap isu-isu kemanusiaan. Pekan HAM 2012 hari ketiga, 05 Desember 2013 diisi dengan pemutaran dan diskusi film bertemakan hak asasi manusia.

Salah satu upaya untuk menggugah kesadaran generasi muda mengenai HAM adalah dengan mengemas isu-isu HAM sesuai selera generasi muda, oleh karena itu kegiatan hari keempat, 06 Desember 2013 diisi dengan konser musik bertemakan “*Music for Human Rights*”. Kampanye “*Right Human for Human Rights*” juga dilaksanakan di luar kampus dengan menggelar Pendidikan HAM di Dusun Walikan, Pulutan, Wonosari, Gunung Kidul, 08 Desember 2013. Kampanye yang dikemas dalam bentuk Pendidikan HAM ini mengusung tema “*Human Rights from*

Me for You” dengan tujuan untuk membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya HAM sebagai hak fundamental.

Pekan HAM 2013 ditutup dengan kampanye “*Right Human for Human Rights*” di pusat Kota Yogyakarta. Aksi damai tersebut bertepatan dengan *International Human Rights Day*, 10 Desember 2013. Pada kegiatan tersebut dibagikan 1000 bunga bagi masyarakat Kota Yogyakarta sebagai simbol untuk menggugah kesadaran publik mengenai HAM yang merupakan elemen fundamental martabat ras manusia (*human dignity*).

c. Pekan Hak Asasi Manusia Tahun 2014

Pada tahun 2013, pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia secara konsep dan ruang lingkup kegiatan sedikit berbeda dengan pelaksanaan tahun-tahun sebelumnya. Bila Pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia tahun 2012 dan 2013 terbatas pada lingkup regional DI Yogyakarta, maka ruang lingkup pelaksanaan pada tahun ini berskala Nasional. Beberapa kegiatan dibuat dengan melibatkan partisipasi warga negara dari beberapa wilayah Indonesia. Tema yang diusung pada pelaksanaan tahun ini adalah “Indonesia, Kita, dan HAM”.

Pembukaan Pekan HAM 2013 pada tanggal 05 Desember 2014 diawali dengan pelaksanaan Seminar Nasional bertajuk “Hak Asasi Manusia dan Etnonasionalisme”. Maraknya gerakan-gerakan etnonasionalisme di banyak tempat di Indonesia serta konsepsi HAM sebagai perlindungan individu-individu warga negara ataukah HAM dipahami sebagai "hak segala bangsa" menjadi titik fokus pembahasan. Isu tersebut dibedah secara apik oleh Penulis buku “Politik Jarak Jauh Diaspora Aceh”, Dr. Antje Missbach yang juga seorang pakar hukum dari University of Melbourne, Dr. Otto Syamsuddin Ishak sebagai Ketua KOMNAS HAM periode 2012-2013, serta Dr. Samsuri, S.Pd., M.Ag.

Kegiatan dilanjutkan dengan donor darah pada senin, 9 Desember 2014. Serupa dengan pelaksanaan tahun sebelumnya, kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kepedulian sosial generasi muda terhadap isu-isu kemanusiaan. *Human Rights Day* yang diperingati secara

internasional pada 10 Desember 2014 masih menjadi kegiatan terpenting pada tahun ini, meskipun bukan lagi menjadi acara penutup seperti tahun-tahun sebelumnya. *Human Rights Day* diperingati dengan pembagian 1000 bunga kepada masyarakat Kota Yogyakarta sebagai simbol untuk menggugah kesadaran publik mengenai HAM yang merupakan elemen fundamental martabat ras manusia (*human dignity*). Di hari yang sama juga digelar aksi damai menuntut pemerintah mengusut tuntas kasus pembunuhan terhadap wartawan Udin.

Dalam rangka pemajuan HAM (*promoting human rights*) di level diskursif (wacana) di gelar Lomba Debat tingkat Regional Yogyakarta pada tanggal 15 Desember 2014. Peserta debat merupakan siswa-siswa Sekolah Menengah Atas di Yogyakarta. Pemajuan HAM pada tataran pengembangan sudut pandang dan gagasan dalam melihat isu-isu aktual HAM menjadi fokus utama dalam kegiatan ini.

Hal baru dalam pelaksanaan tahun 2014 adalah digelarnya lomba fotografi tingkat Nasional. Tujuan lomba adalah mengajak warga negara Indonesia untuk berpartisipasi menampilkan potret persoalan pemenuhan HAM di berbagai tempat di Indonesia. Ratusan partisipan tercatat ikut berpartisipasi dalam lomba tersebut. Semua karya fotografi yang masuk, diseleksi untuk kemudian ditampilkan dalam pameran Fotografi dan lukisan bertajuk “Wajah HAM Indonesia”. Pameran Fotografi dan lukisan yang digelar pada tanggal 16 Desember 2014 menjadi potret HAM Indonesia, bahwa sesungguhnya perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM di Indonesia masih menyisahkan banyak masalah. Di hari yang sama dengan pelaksanaan Pameran Foto, juga digelar Konser musik bertemakan kemanusiaan sekaligus menjadi acara penutup dari rangkaian acara Pekan Hak Asasi Manusia.

Jadi, selama tiga tahun terakhir terlaksana beberapa kegiatan dalam Proyek Pekan HAM. Kegiatan tersebut adalah: 1) Pameran Foto dan Lukisan pada 2012 dan 2013, 2) pemutaran dan diskusi film pada 2012 dan 2012, 3) Seminar Hak Asasi Manusia pada 2012 dan 2014, 4) Bakti

Sosial dan Pendidikan HAM bagi Anak-anak Panti Asuhan pada 2012 dan 2013, 5) Donor darah, pada 2013 dan 2014, 6) Konser musik kemanusiaan dalam 3 kali Pekan HAM, 7) Kampanye Pendidikan HAM pada tahun 2013, 8) Lomba foto kemanusiaan pada 2014, 9) Lomba debat pada 2014, dan 10) Unjuk Rasa Damai dalam tiga tahun Pekan HAM, plus pembagian 1000 bunga dalam rangka Peringatan Hari HAM Internasional pada 2014.

Ketiga, evaluasi. Evaluasi program secara sederhana ditujukan untuk menilai capaian kerja serta bagaimana menyempurnakan program selanjutnya. Keberhasilan program dapat dilihat dari kesesuaian antara tujuan dan capaian program yang diperinci dengan indikator keberhasilan program. Secara umum, tujuan pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia adalah sebagai instrument untuk membangun kepedulian antar sesama ras manusia dan kesadaran akan pentingnya HAM sebagai hak dasar manusia, sehingga indikator sebagai alat ukur untuk menilai keberhasilan proyek Pekan Hak Asasi Manusia adalah seberapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan dan seberapa besar posisi tawar program untuk membuat gerakan penyadaran akan pentingnya HAM.

Ada 2 bentuk evaluasi yang digunakan pada pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia, yaitu *formative evaluation* dan *summative evaluation*. *Formative evaluation* merupakan penilaian yang dilakukan saat program masih atau sedang berjalan guna meningkatkan kinerja program. Evaluasi ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai rencana dan jadwal sehingga tujuan dapat tercapai tepat waktu. Evaluasi seperti ini rutin diadakan, setiap sore pada hari pelaksanaan proyek, biasanya dilakukan dalam bentuk diskusi kelompok antar pelaksana program.

Evaluasi yang kedua adalah *summative evaluation*, yaitu evaluasi di akhir program untuk memastikan bahwa program yang dijalankan berhasil sesuai tujuan program. Jika alat ukur untuk menilai keberhasilan adalah seberapa banyak orang yang terlibat dalam kegiatan, maka proyek ini dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pihak

yang terlibat dalam kegiatan, seperti: mahasiswa, *Indonesian Legal Aid and Human Rights Assosiation*, Seniman, Komunitas Fotografi. Panti asuhan, *Indonesian Red Cross Society*, dan media Massa.

Bahkan secara kuantitatif, jumlah peserta dalam beberapa program, dari pelaksanaan proyek Pekan Hak Asasi Manusia tahun 2012 sampai 2014 mencatat angka yang signifikan bila dibandingkan dengan kegiatan lain di tempat tempat yang sama. Sebagai contoh: pelaksanaan konser amal bertajuk “*Music for Humanity*” pada hari Jumat 9 Desember 2012 berhasil menghadirkan peserta sebanyak 210 orang mahasiswa. Kegiatan donor darah yang dilakukan tanggal 04 Desember 2013 diikuti oleh 95 orang pendonor. Kegiatan lomba fotografi pada tahun 2014 diikuti oleh 90 orang fotografer dari seluruh Indonesia, pameran Fotografi dan lukisan bertajuk “Wajah HAM Indonesia” pada tanggal 16 Desember 2014 dihadiri oleh 251 orang, dan seminar HAM pada tanggal 05 Desember 2014 dihadiri oleh 310 orang. Keberhasilan lain juga dapat dilihat dari hasil kuantitatif melalui aksi solidaritas dan pembagian bunga yang rutin dilakukan bertepatan dengan *Human Rights Day* yang secara internasional di peringati tanggal 10 Desember.

2. Para pihak yang terlibat

HAM kini menjadi salah satu isu penting dalam kehidupan masyarakat, baik secara politik dan ekonomi maupun sosial dan budaya, baik dalam konteks nasional maupun global. Keterlibatan semua pihak dalam gerakan perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM selayaknya dilakukan secara komprehensif dalam berbagai level gerakan, utamanya di level diskursif (wacana), di aras politik, dan di wilayah hukum. Masing-masing level memberikan sumbangsih terhadap pemajuan HAM (*promoting human rights*). Hal ini tentunya menjadikan proyek Pekan Hak Asasi Manusia sebagai wahana bagi semua pihak untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM

Proyek Pekan Hak Asasi Manusia tidak dilaksanakan sendiri oleh mahasiswa atau pun diserahkan sepenuhnya kepada pihak lain. Pelaksanaan program proyek Pekan Hak Asasi Manusia bekerjasama dan melibatkan pemerintah daerah dan *stakeholder* yang memiliki keterkaitan dan kepentingan secara langsung terhadap perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan pemenuhan HAM, misalnya: *Indonesian Legal Aid and Human Rights Assosiation*, Seniman, Komunitas Fotografi. Panti asuhan, *Indonesian Red Cross Society*, dan media Massa. Melalui kerja sama dengan berbagai pihak, hal ini sangat mendorong keberhasilan Proyek Pekan Hak Asasi Manusia.

3. Disain Dampak bagi Penanaman Nilai-nilai Kemanusiaan

Proyek Pendidikan HAM didisain untuk menghasilkan dampak signifikan bagi penanaman nilai-nilai kemanusiaan. Promosi HAM melalui Proyek HAM diharapkan dapat menjadi media pembelajaran untuk memperkuat tumbuhnya nilai-nilai yang mendorong dan memberikan keyakinan kepada peserta untuk bersikap dan bertindak secara konstruktif bagi penghormatan kepada derajat kemanusiaan yang setinggi-tingginya.

Meminjam perspektif Frankl, penanaman nilai-nilai kemanusiaan didisain melalui tiga proses utama:

- a. *Creation/karya*. Kegiatan-kegiatan dalam Proyek Pekan HAM didisain untuk menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan melalui proses kreatif. Aktivitas-aktivitas di dalam Pekan HAM akan menumbuhkan dan memperkuat tumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan melalui kegiatan seperti menghasilkan karya fotografi, menyanyikan lagu-lagu kemanusiaan, mengorganisasi kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan sebagainya.
- b. *Experience/pengalaman langsung*. Pekan HAM didisain untuk membiasakan para peserta berinteraksi dengan pengalaman-pengalaman yang menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Seminar dan diskusi publik tentang Hak Asasi Manusia tidak

saja meluaskan wawasan mahasiswa tentang HAM, namun juga menanamkan nilai-nilai HAM dalam interaksi dengan para aktivis HAM dan korban pelanggaran HAM seperti keluarga korban penghilangan paksa. Kegiatan donor darah, misalnya, memberikan pengalaman tentang bagaimana membangun kepedulian pada isu-isu kemanusiaan.

- c. *Attitude*/tindakan dan perilaku nyata. Beberapa kegiatan dalam proyek Pekan HAM didisain untuk mendorong peserta memilih tindakan dan perilaku yang berdasar kepada nilai-nilai kemanusiaan. Sebagai contoh, ketika mahasiswa membagikan 1000 bunga kepada masyarakat sebagai bentuk respek, mereka sesungguhnya sedang mempraktikkan perilaku peace, love, dan non-violence. Begitu pula ketika mereka mendonorkan darahnya kepada orang yang membutuhkan, mereka sedang melakukan tindakan yang benar kepada sesama umat manusia.

Dengan memberikan penanaman nilai-nilai melalui creative, experiential, dan attitudinal processes, diharapkan mahasiswa dan peserta Pekan HAM pada umumnya dapat membangun nilai-nilai kemanusiaan berupa kebenaran, perilaku baik, kedamaian, cinta, dan anti-kekerasan. Jika nilai-nilai tersebut sudah tertanam, maka buahnya adalah akan tercipta masyarakat demokratis yang damai dan setara serta menjunjung tinggi hak asasi manusia.

B. Penanaman Nilai-Nilai Kemanusiaan

1. Keberhasilan dalam Penanaman Nilai-Nilai

Analisis keberhasilan dalam penanaman nilai-nilai HAM melalui Pekan HAM dilakukan melalui berbagai instrumen baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Dalam pandangan para peserta Pekan HAM, 81,3 persen peserta menyatakan bahwa pekan Hak Asasi Manusia dapat menumbuhkan nilai kebenaran melalui berbagai kegiatan Pekan HAM. Kegiatan yang paling banyak disebut dapat meningkatkan nilai kejujuran

dalam diri mereka secara berturut-turut adalah: donor darah, bakti sosial di panti asuhan, pemutaran film dan diskusi film, serta aksi damai tematik HAM.

Selain itu, proyek Pekan HAM menurut 78,1 persen mahasiswa dapat meningkatkan nilai *right-conduct*. Kegiatan yang paling banyak disebut dapat meningkatkan nilai ini adalah: donor darah, bakti sosial, kampanye pendidikan HAM di tengah-tengah masyarakat (panti sosial dan masyarakat pedesaan), lomba foto, aksi damai secara tematik, dan konser kemanusiaan.

Pekan HAM juga dapat menumbuhkan nilai kecintaan (*love*) pada sesama dan semesta raya. Penanaman nilai universal cinta melalui Pekan HAM dinyatakan berhasil oleh 91,2 persen peserta. Beberapa kegiatan yang banyak disebut dapat meningkatkan nilai ini, secara berturut-turut adalah: bakti sosial, donor darah, pameran foto dan lukisan, konser music kemanusiaan, aksi unjuk rasa damai dan pembagian 1000 bunga.

Sedangkan nilai kedamaian (*peace*) dinyatakan berhasil ditanamkan melalui Pekan HAM oleh 96 persen peserta. Beberapa kegiatan yang disebut dapat menanamkan nilai *peace* secara berturut adalah: bakti sosial, donor darah, konser music kemanusiaan, unjuk rasa damai hari HAM dan pembagian 1000 bunga, dan pameran foto dan lukisan peristiwa kemanusiaan.

Selain itu, Pekan HAM dipandang berhasil menanamkan nilai-nilai anti kekerasan oleh 83,6 persen peserta. Beberapa kegiatan yang disebut dapat menumbuhkan jiwa anti-kekerasan secara berturut-turut sebagai berikut: aksi damai peringatan Hari HAM Internasional dan pembagian 1000 bunga, konser musik, bakti sosial, donor darah, serta pameran foto dan lukisan kemanusiaan.

Studi ini menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan-kegiatan pada Pekan HAM dapat menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan di kalangan pesertanya. Dengan demikian, merujuk pada kerangka teoretik mengenai nilai-nilai kemanusiaan yang diacu studi ini, Pekan HAM dapat

menanamkan nilai-nilai kemanusiaan berikut secara berturut-turut: 1) Kedamaian/perdamaian (*peace*), 2) Kecintaan (*love*), 3) Anti-kekerasan (*non-violence*), 4) Kebenaran (*truth*), dan 5) Berperilaku benar (*right-conduct*).

2. Keterbatasan dan Kelemahan

Pelaksanaan Pekan HAM berkaitan dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan juga mengandung beberapa keterbatasan dan kelemahan. Keterbatasan dan kelemahan tersebut dapat diurai sebagai berikut: Pertama, pemilihan kegiatan dalam Pekan HAM. Dalam pandangan peserta Pekan HAM dalam studi ini, tidak semua kegiatan dapat secara spesifik dapat menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Paling tidak, tiga kegiatan tidak disebut secara khusus dapat menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan, yaitu seminar nasional, lomba foto, dan lomba debat.

Kedua, kesulitan manajemen waktu. Kegiatan Pekan HAM sebagai salah satu metode pendidikan untuk penanaman nilai-nilai kemanusiaan selama ini selalu diselenggarakan dalam rentang waktu antara tujuh sampai sepuluh hari, dengan kegiatan rata-rata enam kegiatan. Banyaknya kegiatan tersebut membutuhkan manajemen waktu yang baik, sementara di sisi lain kegiatan Pekan HAM tidak dapat meliburkan kegiatan akademik. Sehingga di samping menyelenggarakan proyek Pekan HAM, peserta juga harus mengikuti perkuliahan mata kuliah-mata kuliah yang lain dalam semester yang sedang berjalan.

Ketiga, biaya besar. Kegiatan Pekan HAM dengan sub-sub kegiatan yang banyak membutuhkan pembiayaan yang relatif besar. Selama ini, kegiatan didukung oleh anggaran negara melalui DIPA Fakultas Ilmu Sosial serta urunan dosen dan mahasiswa. Beberapa kegiatan disukung juga oleh kontribusi peserta lomba, yaitu kegiatan lomba debat dan lomba fotografi. Di luar itu, juga ada dukungan sponsor, meskipun tidak signifikan dan tidak pernah dalam bentuk dana segar atau uang *cash*.

Dalam tingkatan tertentu dan bagi beberapa mahasiswa, kegiatan Pekan HAM relatif memberatkan dari sisi biaya penyelenggaraan kegiatan.

3. Beberapa Rekomendasi Pelaksanaan Pekan HAM

Setelah menganalisis keberhasilan penanaman nilai-nilai kemanusiaan serta keterbatasan dan kelemahan penyelenggaraan Pekan HAM, ada beberapa rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan serupa di waktu yang akan datang, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang lain, sebagai berikut:

Pertama, dari sisi pemilihan sub-sub kegiatan Pekan HAM harus dicermati secara seksama terutama dari aspek relevansi. Relevansi yang dimaksud tentu didasarkan pada apa tujuan pelaksanaan masing-masing kegiatan, dikaitkan dengan tujuan umum Pekan HAM.

Kedua, koordinasi lebih luas antar *stakeholders*. Proyek Pekan HAM berisi kegiatan yang banyak, melibatkan banyak orang, dengan biaya cukup mahal. Beberapa pihak yang berkaitan secara khusus dengan Pekan HAM di Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, antara lain: mahasiswa, dosen pengampu mata kuliah, pengurus Jurusan, dan pihak Fakultas yang menaungi Jurusan, dalam hal ini Fakultas Ilmu Sosial.

Koordinasi yang lebih baik di antara para *stakeholders* tersebut akan mempermudah manajemen kegiatan, seperti manajemen waktu agar Pekan HAM tidak mengganggu waktu-waktu untuk aktivitas akademik yang lain, pendanaan sehingga tidak terlalu memberatkan keuangan penyelenggara, dan sebagainya. Koordinasi tersebut dapat dilakukan dalam tahap perencanaan dan implementasi.

Ketiga, strategi *fund-raising* yang lebih tepat. Proyek Pekan HAM sesungguhnya merupakan even yang bisa direncanakan secara lebih baik dari sisi pengumpulan dana-dana sponsor dan donator. Persoalan utama sponsor tersebut barangkali adalah waktu penyelenggaraan yang selalu diadakan pada bulan Desember, dimana peringatan Hari HAM

Internasional diselenggarakan pada tanggal 10 Desember setiap tahun. Pada bulan tersebut, lembaga-lembaga resmi baik pemerintah maupun swasta pada umumnya sudah tutup buku anggaran dan memasuki tahap laporan. Dengan demikian *fund-raising* dapat diarahkan pada donator-donatur perseorangan yang memiliki *concern* pada isu-isu hak asasi manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari ulasan terdahulu dapat dirumuskan beberapa kesimpulan terkait dengan proyek Pekan HAM dan kaitannya dengan penanaman nilai-nilai kemanusiaan, sebagai berikut:

Pertama, detil pelaksanaan Pekan HAM dapat diurai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Perencanaan meliputi penentuan tujuan, penentuan tema, menetapkan struktur organisasi pelaksana, merancang program, penentuan lokasi, alokasi dana, merencanakan strategi implementasi, dan merencanakan evaluasi. Implementasi Pekan HAM meliputi kegiatan: Pameran foto dan lukisan kemanusiaan, Pemutaran dan diskusi film kemanusiaan, Seminar Hak Asasi Manusia, Bakti Sosial dan Pendidikan HAM bagi Anak-anak Panti Asuhan, Donor darah, pada 2012 dan 2013, Konser musik kemanusiaan, Kampanye Pendidikan HAM di masyarakat, Lomba foto kemanusiaan, Lomba debat HAM, serta unjuk rasa damai dan pembagian 1000 bunga dalam rangka Peringatan Hari HAM Internasional. Evaluasi atas kegiatan tersebut telah dilakukan secara sumatif dan formatif.

Kedua, Pekan HAM berhasil menanamkan nilai-nilai kemanusiaan berikut secara berurutan: kedamaian/perdamaian (peace), kecintaan (love), anti-kekerasan (non-violence), kebenaran (truth), dan perilaku baik (right-conduct). Meskipun demikian, proyek Pekan HAM juga memiliki keterbatasan dan kelemahan dalam aspek pemilihan sub-sub kegiatan, manajemen waktu, dan biaya operasional. Untuk itu diajukan beberapa rekomendasi untuk penyelenggaraan kegiatan serupa di waktu yang akan datang, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang lain, yaitu: pemilihan kegiatan secara lebih seksama, koordinasi antar stakeholders yang lebih luas, dan pemilihan strategi fund-raising yang lebih tepat, khususnya donator perseorangan.[]

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, untuk penyelenggaraan kegiatan serupa di waktu yang akan datang, baik di tempat yang sama maupun di tempat yang lain, diajukan saran bahwa:

1. Pemilihan kegiatan harus dilaksanakan secara lebih seksama,
2. Koordinasi antar *stakeholders* harus meliputi *coverage* yang lebih luas, dan;
3. Pemilihan strategi *fund-raising* yang lebih tepat, khususnya donator perseorangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens, K. 1993. *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Donnelly, Jack. 2003. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Ithaca and London: Cornell University Press
- Eko Riyadi (ed.). 2008. *Hukum Hak Asasi Manusia* Yogyakarta: PusHAM UII
- International Covenant on Civil and Political Rights dan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1966
- Khan, Irine. 2005. "Human rights and civil society: the last frontier". *Public Lecture*. London School of Economics, 19 January 2005
- Kompas, 18 Agustus 2010
- Millon, Theodore. 2004. *Masters of Mind: Exploring the Story of Mental Illness from the Ancient Times to the New Millenium*. New Jersey: John Wiley and Sons, Inc.
- Mulyana, Rohmat. 2004. *Mengartikulasikan Pendidikan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Muzaffar, Chandra, dkk. 2007. *Human`s Wrong: Rekor Buruk Dominasi Barat atas HAM* (terj.) Yogyakarta: Pilar Media
- Parnell, Chris. 2014. *Human Values*. <http://www.saieditor.com/falco/values.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2014
- Preamble (pembukaan) Universal Declaration of Human Rights (UDHR) yang diadopsi Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948.
- Rafael Edy Bosko, "Prinsip-prinsip HAM", materi dalam *Modul Penataran Hak Asasi Manusia Untuk Guru*, dilaksanakan oleh Depdiknas bekerjasama dengan Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, di Bogor, tanggal 5-8 Oktober 2004
- Rukiyati, et.al. 2011. *Pendidikan Pancasila*. Yogyakarta: UNY Press
- Setara Institute. 2013. "Laporan Indeks Kinerja HAM Indonesia tahun 2013". *Press Release*. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

United Nations. 1993. *Vienna Declaration and Programme of Action*, adopted by the World Conference on Human Rights in Vienna on 25 June 1993

_____ 1996. *Resolution of General Election No. 51/104. United Nations Decade for Human Rights Education and public information activities in the field of human rights*. 12 Desember 1996

_____ 1997. *United Nations Decade for Human Rights Education (1995-2004) and public information activities in the field of human rights*. A/52/469/Add.1, 20 October 1997

LAMPIRAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Dr. Suharno, M.Si.
NIP. : 19680417 200003 1 001
Jabatan : Lektor Kepala
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Menyatakan pergantian Ketua Tim Peneliti Penelitian Melibatkan Mahasiswa pada Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, dengan judul “PENANAMAN NILAI-NILAI KEMANUSIAAN MELALUI PROYEK PEKAN HAK ASASI MANUSIA (Studi atas Pelaksanaan Pekan Hak Asasi Manusia 2012-2014)”, karena alasan bahwa saya sudah menjadi Ketua Tim Peneliti di penelitian yang lain, kepada Ketua Peneliti:

Nama : Halili, S.Pd., M.A.
NIP. : 19780514 200604 1 004
Jabatan : Asisten Ahli
Jurusan : Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum

Demikian pernyataan ini untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Oktober 2015

Dr. Suharno, M.Si.
NIP. 19680417 200003 1 001